

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan

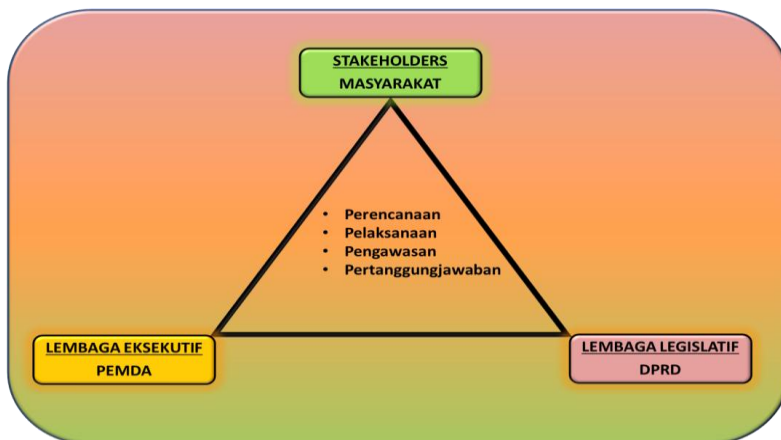
7.1. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 - 2019

Kebijakan umum pembangunan merupakan uraian strategi ke dalam rumusan yang lebih spesifik, konkrit, operasional, yang dimaksudkan agar penyusunan program pembangunan lebih terfokus dan tepat sasaran. Perumusan kebijakan umum diarahkan dalam 3 perspektif yaitu 1) kejelasan segmentasi masyarakat yang dilayani, 2) kelembagaan dan operasionalisasi SKPD, dan 3) kemampuan keuangan daerah dalam mendukung strategi pembangunan.

Secara umum kebijakan pokok dalam proses pelaksanaan, percepatan dan pemantapan capaian sasaran pembangunan Kabupaten Ende adalah optimalisasi peran dan tanggungjawab seluruh komponen masyarakat, yang dikenal dengan **MODEL SEGITIGA MEMBANGUN KABUPATEN ENDE**. Model segitiga membangun meliputi **SEGITIGA PENDEKATAN**, **SEGITIGA KEMITRAAN** dan **SEGITIGA KEKUATAN BEKERJA** yang dijabarkan sebagai berikut:

1. MODEL SEGITIGA PENDEKATAN MEMBANGUN KABUPATEN ENDE

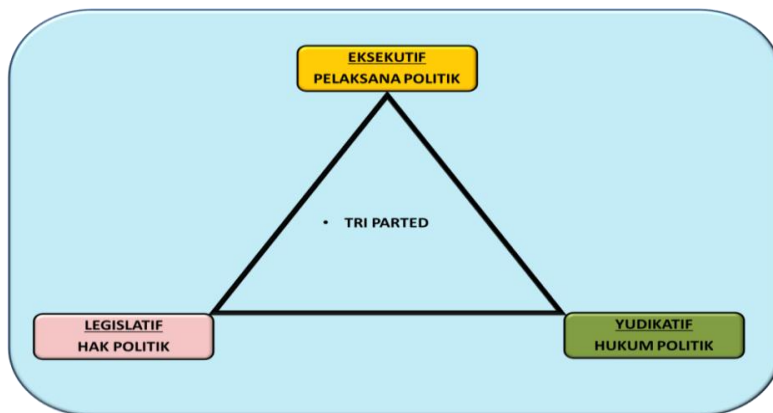
Merupakan kekuatan sinergi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan antara Pemerintah dengan Masyarakat/ stakeholders dan DPRD. Proses penguatan sinergi dilakukan melalui pendekatan baik secara formal maupun informal, melalui komunikasi, dialog yang setara dan seimbang antara Pemerintah, Masyarakat/ Stakeholders dan DPRD.



Gambar 7. 1 Model Segitiga Pendekatan Membangun Kabupaten Ende

2. MODEL SEGITIGA KEMITRAAN MEMBANGUN KABUPATEN ENDE

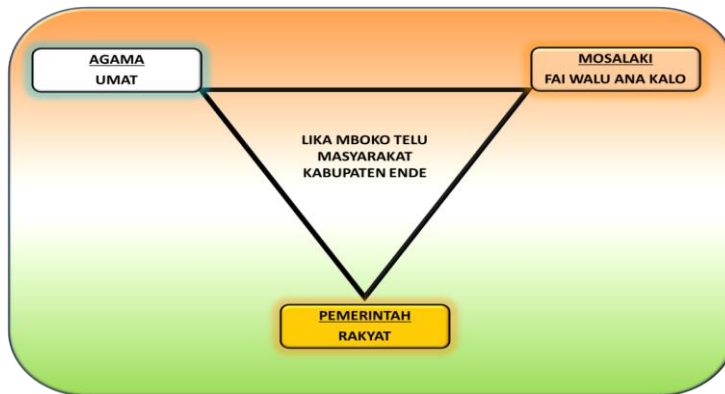
Merupakan kekuatan sinergi **“TRI PARTED”** antara eksekutif selaku pelaksana politik, legislatif selaku pemegang hak politik dan yudikatif yang berwenang dalam hukum politik. Proses penguatan sinergi dilakukan melalui kemitraan TRI PARTED yang harmonis, setara dan seimbang antara Eksekutif – Legislatif – Yudikatif, untuk mengawasi Pemerintah Daerah selaku pemegang mandat politik dalam melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan regulasi dan rambu-rambu yang mengaturnya, DPRD selaku pemegang mandat Hak Politik untuk mengawasi dan merekomendasikan terhadap upaya-upaya percepatan pencapaian indikator kinerja yang telah disepakati bersama, serta Lembaga Hukum selaku pemegang mandat penyelenggaraan dan penegakkan hukum, untuk mengawasi seluruh proses pembangunan yang berlangsung.



Gambar 7. 2. Model Segitiga Kemitraan Membangun Kabupaten Ende

3. MODEL SEGITIGA KEKUATAN BEKERJA MEMBANGUN KABUPATEN ENDE

Merupakan kekuatan sinergi **“LIKA MBOKO TELU atau TIGA BATU TUNGKU”**. dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan mendayagunakan seluruh potensi yang ada di Kabupaten Ende, yaitu: Pemerintah dengan Masyarakatnya, Agama dengan Ulayatnya dan *Mosalaki* dengan *Fai Walu Ana Kalo*-nya. Pemerintah akan melaksanakan mandat politik yang diberikan oleh masyarakat sebaik-baiknya, agar hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan dapat memenuhi harapan seluruh masyarakat Kabupaten Ende dan mampu untuk mensejahterakannya secara adil dan merata. Para tokoh agama dengan umatnya serta mosalaki dengan fai walu ana kalo-nya, diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif untuk mensukseskan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.



Gambar 7. 3. Model Segitiga Kekuatan Bekerja Membangun Kabupaten Ende

Selain kebijakan pokok tersebut diatas, dirumuskan Kebijakan Umum penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang didasarkan pada bidang prioritas utama yang meliputi:

- **Bidang Prioritas Pendidikan**

1. Peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) dan akses kelembagaan serta sarana prasarana pendidikan dan perpustakaan termasuk pendidikan bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus (difabel);
2. Peningkatan pembinaan kelembagaan, akses serta sarana prasarana kepemudaan dan olahraga;
3. Peningkatan insentif dan sarana prasarana pendukung bagi tenaga pendidik yang melayani di wilayah terpencil dan pedalaman.

- **Bidang Prioritas Kesehatan**

1. Percepatan penurunan kematian ibu, bayi baru lahir dan balita;
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata bagi seluruh masyarakat dan pertimbangan pembangunan rumah sakit satelit di wilayah utara yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal dan kondisi ketersediaan sarana prasarana serta ketenagaan;
3. Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan mengintegrasikannya ke dalam program dan kegiatan yang terkait dengan sanitasi dan lingkungan;
4. Peningkatan insentif dan sarana prasarana pendukung bagi tenaga kesehatan yang melayani di wilayah terpencil dan pedalaman;
5. Peningkatan cakupan pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

- **Bidang Prioritas Ekonomi dan Pariwisata**

1. Meningkatkan ketahanan pangan daerah dengan mengoptimalkan produksi dan produktivitas lahan pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan;
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga ekonomi (Koperasi, UMKM, BUMDes dan lembaga ekonomi mikro lainnya) serta informasi pasar komoditi unggulan daerah yang kompetitif;
3. Mendayagunakan potensi kepariwisataan dan kebudayaan daerah untuk mendukung perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan Sepekan Pesta Danau Kelimutu;

- **Bidang Prioritas Penunjang: Infrastruktur dan Lingkungan Hidup**
 1. Meningkatkan konektivitas antar daerah dengan membangun jalan-jalan paralel yang menghubungkan antar kecamatan dan antar desa;
 2. Meningkatkan akses terhadap air bersih untuk masyarakat, baik di perkotaan maupun perdesaan;
 3. Meningkatkan akses listrik untuk kebutuhan masyarakat, dengan fokus agar seluruh desa dapat menikmati listrik;
 4. Menertibkan seluruh pertambangan liar dan meninjau kembali ijin pertambangan yang telah diberikan, dan berpotensi merusak lingkungan.
- **Bidang Prioritas Penunjang: Penataan Birokrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum, HAM, Keamanan dan Ketertiban**
 1. Meningkatkan kepatuhan dan konsistensi terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yang telah ditetapkan;
 2. Pengintegrasian Standar Pelayanan Minimal ke dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah daerah;
 3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan melalui kegiatan Selasa Keliling-Sabtu Keliling (Selang-Saling);
 4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui intensifikasi terhadap sumber-sumber penghasilan dan pajak dan retribusi daerah, termasuk pajak bumi dan bangunan (PBB) yang telah diserahkan kewenangannya oleh pemerintah kepada pemerintah daerah;
 5. Penyediaan tunjangan kinerja kepada aparatur sipil negara, yang disesuaikan dengan wilayah pelayanannya (terpencil, pedalaman dan dalam kota) dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah;
 6. Meningkatkan kemitraan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, swasta dan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan;
 7. Mengatasi kemiskinan masyarakat melalui peningkatan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dengan mengalokasikan dana pembangunan untuk desa dan kelurahan dari APBD Kabupaten Ende, minimal sebesar Rp. 700 juta sampai dengan 1 Milyar per desa dan kelurahan dan kegiatan swakelola oleh masyarakat;
 8. Mengintegrasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari pusat, dan provinsi serta lintas sektor lainnya dengan program ungulan daerah serta validasi data kemiskinan daerah untuk dijadikan acuan bagi SKPD terkait dalam merencanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan;
 9. Menciptakan lapangan pekerjaan masyarakat, melalui program pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh daerah dengan mengacu kepada berbagai pembelajaran cerdas masyarakat dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan.

7.2. Program Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 - 2019

Upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, dilaksanakan melalui program pembangunan Kabupaten Ende yang disebut “**TIWU TELU atau Tri Warna Program Pembangunan Kabupaten Ende**”, yaitu: **Pendidikan, Kesehatan Dan Ekonomi** didukung dengan program-program penunjang lainnya, yaitu: Infrastruktur dan Lingkungan hidup serta Penataan Birokrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum, HAM, Keamanan dan Ketertiban.

Tiwu Telu meliputi program **program strategis** terkait pencapaian Visi dan Misi pembangunan, dan **program operasional** yang diarahkan dalam rangka pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

7.2.1. Program pada Setiap SKPD

Program yang ada pada setiap SKPD ini, pada prinsipnya merupakan program-program yang berkaitan dengan operasional rutin perkantoran, terdiri dari:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; dan
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS;
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Pelaksanaan program rutin ini disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, dengan arahan kebijakan sebagai berikut:

1. Prioritas utama belanja rutin adalah belanja jasa kantor (listrik, air dan telepon)
2. Program *Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur* dilaksanakan secara selektif dan diarahkan dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD. Prioritas utama adalah mendayagunakan sarana dan prasarana yang tersedia, dengan melakukan efisiensi dan manajemen aset dan barang secara lebih terukur. Pengadaan yang dilakukan dengan pertimbangan urgensi apabila tidak dilaksanakan dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar dan memengaruhi pelayanan kepada masyarakat
3. Program peningkatan disiplin aparatur, yang berkaitan dengan pengadaan pakaian dinas aparatur diupayakan melalui pengadaan secara mandiri.
4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS diprioritaskan bagi aparatur yang dipindahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah terpencil dan pedalaman.
5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur diprioritaskan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi serta uraian jabatan aparatur.
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan diarahkan dalam rangka mendukung pertanggungjawaban pengelolaan keuangan SKPD, dan diutamakan pada SKPD yang mempunyai kelebihan beban kerja dalam melaksanakan fungsi pertanggungjawaban.

7.2.2. Program Pembangunan menurut Urusan Wajib dan Urusan Pilihan per masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2014-2019

MISI 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi

1. Urusan Wajib Pendidikan

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
- 3) Program Pendidikan Menengah;
- 4) Program Pendidikan Non Formal;
- 5) Program Pendidikan Luar Biasa;
- 6) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

2. Urusan Wajib Perpustakaan

- 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

3. Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga

- 1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;
- 2) Program peningkatan peran serta kepemudaan;
- 3) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
- 4) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga;
- 5) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
- 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat

1. Urusan Wajib Kesehatan

- 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 3) Program Pengawasan Obat dan Makanan;
- 4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat;
- 5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
- 6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
- 7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
- 8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
- 9) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya;
- 10) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit;
- 11) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit;
- 12) Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan;
- 13) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita;
- 14) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia;
- 15) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan;
- 16) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.

2. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- 1) Program Keluarga Berencana;
- 2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
- 3) Program pelayanan kontrasepsi;
- 4) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri;

- 5) Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
- 6) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR;
- 7) Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS;
- 8) Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
- 9) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga;
- 10) Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU.

MISI 3 : Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan

1. Urusan Pilihan Pertanian

- 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- 2) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan;
- 3) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;
- 4) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
- 5) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
- 6) Program peningkatan produksi hasil peternakan;
- 7) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
- 8) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.

2. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

- 1) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
- 2) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan;
- 3) Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut;
- 4) Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat;
- 5) Program pengembangan budidaya perikanan;
- 6) Program pengembangan perikanan tangkap;
- 7) Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan;
- 8) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;
- 9) Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.

3. Urusan Wajib Katahan Pangan

- 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan;
- 2) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan.

4. Urusan Wajib Kebudayaan

- 1) Program Pengembangan Nilai Budaya;
- 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
- 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
- 4) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.

5. Urusan Pilihan Pariwisata

- 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- 3) Program Pengembangan Kemitraan.

6. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- 1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;

- 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
- 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
- 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
7. **Urusan Pilihan Perdagangan**
 - 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
 - 2) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional;
 - 3) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
 - 4) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
 - 5) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.
8. **Urusan Pilihan Perindustrian**
 - 1) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
 - 2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
 - 3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
 - 4) Program Penataan Struktur Industri;
 - 5) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.
9. **Urusan Wajib Penanaman Modal**
 - 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
 - 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
 - 3) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.
10. **Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
 - 1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
11. **Urusan Wajib Ketenagakerjaan**
 - 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
 - 3) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
12. **Urusan Wajib Administrasi Keuangan Daerah**
 - 1) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota.

Misi 4 : Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Secara Kuantitatif maupun Kualitatif Sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah yang Ramah Lingkungan

1. **Urusan Wajib Pekerjaan Umum**
 - 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 2) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
 - 3) Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong;
 - 4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - 5) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong;
 - 6) Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan;
 - 7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
 - 8) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
 - 9) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku;
 - 10) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
 - 11) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;

- 12) Program Pengendalian Banjir;
- 13) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
- 14) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan.
2. **Urusan Wajib Perhubungan**
 - 1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
 - 2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
 - 3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
 - 4) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
 - 5) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas;
 - 6) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
3. **Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral**
 - 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan;
 - 2) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan;
 - 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
4. **Urusan Wajib Perumahan**
 - 1) Program Pengembangan Perumahan;
 - 2) Program Lingkungan Sehat Perumahan;
 - 3) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan;
 - 4) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial;
 - 5) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;
 - 6) Program Pengelolaan Areal Pemakaman.
5. **Urusan Wajib Lingkungan Hidup**
 - 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
 - 2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
 - 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - 4) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam;
 - 5) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 6) Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
 - 7) Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan;
 - 8) Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut;
 - 9) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
6. **Urusan Wajib Penataan Ruang**
 - 1) Program Perencanaan Tata Ruang;
 - 2) Program Pemanfaatan Ruang;
 - 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
7. **Urusan Pilihan Kehutanan**
 - 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;
 - 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - 3) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan;
 - 4) Program Peningkatan Fungsi Hutan Mangrove & Hutan Pantai;

Misi 5 : Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat

1. **Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan**
 - 1) Program Pengembangan Data/Informasi;
 - 2) Program Kerjasama Pembangunan;

- 3) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
 - 4) Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar;
 - 5) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 6) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 7) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
 - 8) Program Perencanaan Sosial Budaya;
 - 9) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.
- 2. Urusan Wajib Statistik**
- 1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
- 3. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**
- 1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
 - 3) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota;
 - 5) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 6) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
 - 7) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
 - 8) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
 - 9) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
 - 10) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - 11) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah;
 - 12) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
 - 13) Program Penataan Daerah Otonomi Baru;
 - 14) Program Pendayagunaan Aparatur Negara.
- 4. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
- 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
 - 2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
 - 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
 - 4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - 5) Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan.
- 5. Urusan Wajib Kearsipan**
- 1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;
 - 2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah;
 - 3) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan;
 - 4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
- 6. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika**
- 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
 - 2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi;
 - 3) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;
 - 4) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa.

7. **Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
 - 1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
 - 2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
 - 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
 - 4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
 - 5) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
8. **Urusan Wajib Sosial**
 - 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
 - 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
 - 3) Program Pembinaan Anak Terlantar;
 - 4) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;
 - 5) Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo;
 - 6) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya);
 - 7) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
9. **Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**
 - 1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
 - 2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
 - 3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
 - 4) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
 - 5) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
 - 6) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat);
 - 7) Program Pendidikan Politik Masyarakat;
 - 8) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
10. **Urusan Pertanian**
 - 1) Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah;
 - 2) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
 - 3) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanian;
 - 4) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanian.
11. **Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil**
 - 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Hubungan antara arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, program pembangunan, urusan dan SKPD penanggungjawab disajikan pada tabel Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah berikut ini.

Tabel 7. 1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

MISI 1 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING TINGGI

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>ourcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2019)			
1.	Sasaran 1: Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel)							
		Strategi: Menyelenggarakan proses pendidikan bermutu yang mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas pada semua jenis dan jenjang pendidikan termasuk pendidikan berkebutuhan khusus (difabel):						
		Arah Kebijakan: 1) Penyediaan dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas pada semua jenis dan jenjang pendidikan termasuk pendidikan bagi masyarakat berkebutuhan khusus (difabel);	Rasio Guru Berbanding Murid SD/MI	770	770	Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dinas PPO
			Rasio Guru Berbanding Murid SMP/MTs	900	944		Pendidikan	Dinas PPO
			Rasio Guru Berbanding Murid SMA/MA/SMK	720	720	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Dinas PPO
		2) Peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan kependidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan termasuk pendidikan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel);	Guru SD/MI yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	22,47 %	22,84 %	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas PPO
			Guru SMP/MTs yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	82,83 %	83,65 %		Pendidikan	Dinas PPO
			Guru SMA/MA yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	95,09 %	96,07 %		Pendidikan	Dinas PPO
			Guru SMK yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	90,63 %	92,33 %		Pendidikan	Dinas PPO
		Arah Kebijakan: 3) Peningkatan mutu lulusan pada semua jenis dan jenjang pendidikan termasuk pendidikan bagi masyarakat berkebutuhan khusus (difabel).	Angka Kelulusan SD/MI	98,43 %	99,44 %	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Dinas PPO
			Angka Kelulusan SMP/MTs	96,83 %	99,38 %		Pendidikan	Dinas PPO
			Angka Kelulusan SMA/MA	98,04 %	100 %		Pendidikan	Dinas PPO
			Angka Kelulusan SMK	94,65 %	99,59 %		Pendidikan	Dinas PPO
2.	Sasaran 2: Meningkatnya Minat Baca Masyarakat							
		Strategi: Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan serta memotivasi minat baca masyarakat						
		1) Penyediaan bahan bacaan yang bermutu; dan 2) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai	Persentase Pengunjung Perpustakaan per tahun	22,16 %	28,84 %	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	84,44 %	100 %			
3.	Sasaran 3: Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk pendidikan bagi masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)							
		Strategi: Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan termasuk pendidikan bagi masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)						
		Arah Kebijakan: 1) Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan orasarana pendidikan	Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk SD/MI	97	97	Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dinas PPO

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>ourcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2019)			
		yang layak untuk proses belajar mengajar pada semua jenis dan jenjang pendidikan termasuk pendidikan bagi masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)	Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk SMP/MTs	59	59	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Dinas PPO
			Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk Pendidikan Menengah	33	33		Pendidikan	Dinas PPO
			Persentase Ruang Kelas SD/MI yang Kondisi Bangunannya Baik/Layak	60,14 %	80,28 %	Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dinas PPO
			Persentase Ruang Kelas SMP/MTs yang Kondisi Bangunannya Baik/Layak	94,16 %	100 %		Pendidikan	Dinas PPO
			Persentase Ruang Kelas SMA/MA yang Kondisi Bangunannya Baik/Layak	91,21 %	100 %	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Dinas PPO
			Persentase Ruang Kelas SMK yang Kondisi Bangunannya Baik/Layak	85,22 %	100 %		Pendidikan	Dinas PPO
4.	Sasaran 4: Meningkatkan Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat							
		Strategi: Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan sejak usia dini						
		Arah Kebijakan: 1) Pemberantasan buta huruf	Angka Melek Huruf	95 %	95,06 %	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Dinas PPO
			2) Penyediaan sarana prasarana pendidikan usia dini (PAUD) di tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase siswa yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	59,77 %			
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI		117,24 %	108,77 %	Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dinas PPO
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs		101,11 %	100,12 %		Pendidikan	Dinas PPO
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK		109,10 %	104,20 %	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Dinas PPO
		3) Penanganan permasalahan putus sekolah peserta didik		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96,76 %	99,30 %	Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	63,52 %	78,47 %	Pendidikan		Dinas PPO
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C	80,58 %	92,83 %	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Dinas PPO
			Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	968	993	Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dinas PPO
			Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	635	785		Pendidikan	Dinas PPO

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>ourcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2019)			
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah	806	928	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Dinas PPO
			Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,50 %	0,21 %	Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dinas PPO
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,61 %	0,24 %	Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dinas PPO
			Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA	1,25 %	0,31 %	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Dinas PPO
			Angka Putus Sekolah (APS) SMK	1,09 %	0,29 %		Pendidikan	Dinas PPO
			Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	101,20 %	100 %	Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dinas PPO
			Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	104,30 %	100 %		Pendidikan	Dinas PPO
5.	Sasaran 5: Terpenuhi Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Pendidik Berdasarkan Karakteristik Wilayah							
		Strategi: Menyediakan Insentif dan Sarana Prasarana bagi tenaga pendidik yang bertugas di wilayah terpencil dan pedalaman						
		Arah Kebijakan: 1) Penyediaan tunjangan tambahan bagi tenaga pendidik di wilayah terpencil dan pedalaman; 2) Pembangunan sarana perumahan bagi tenaga pendidik di wilayah terpencil dan pedalaman.	Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru Tetap pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman	-	15 %	1. Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2. Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Dinas PPO
6.	Sasaran 6: Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga							
		Strategi : Meningkatkan keterlibatan generasi muda secara aktif dalam pembangunan melalui kegiatan kepemudaan dan olahraga						
		Arah Kebijakan: 1) Pembinaan wadah kepemudaan mulai dari tingkat desa dan kelurahan	Pembinaan Kegiatan Kepemudaan	75 %	100 %	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pendidikan	Dinas PPO
						Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Pemerintahan Umum	Bagian Kesra
		2) Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Olahraga bagi Kaum muda dari tingkat desa dan kelurahan	Pembinaan Kegiatan Olahraga	67 %	100 %	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Pendidikan	Dinas PPO

MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG MERATA DAN TERJANGKAU BAGI SELURUH MASYARAKAT

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>ourcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2019)			
1.	Sasaran 1: Terpenuhi Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas sesuai Kebutuhan							
		Strategi: Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat						
		Arah Kebijakan: 1) Peningkatan pembangunan Puskesmas, Pustu, Poskesdes sesuai kebutuhan; dan 2) Pendekatan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masy. dgn upaya untuk membangun Rumah Sakit Satelit di Wilayah Utara, yang disesuaikan dgn kemampuan fiskal dan ketenagaan serta sarana dan pras. pendukungnya.	Rasio Puskesmas per satuan Penduduk	0,09	0,09	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Rasio Pustu per satuan Penduduk	0,189	0,205		Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Rasio Poskesdes per satuan Penduduk	0,167	0,311		Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.	Sasaran 2: Terpenuhi Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Karakteristik Wilayah							
		Strategi: Menyediakan Insentif dan sarana prasana pendukung bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah terpencil dan pedalaman						
		Arah Kebijakan: 1) Penyediaan tunjangan tambahan bagi tenaga kesehatan di wilayah terpencil dan pedalaman; 2) Pembangunan sarana perumahan bagi tenaga medis dan paramedis di wilayah terpencil dan pedalaman.	Penyediaan Rumah Medis dan Paramedis di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman	61,22 %	67,35 %	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan
3.	Sasaran 3: Terpenuhi Tenaga Kesehatan yang Merata dan Berkualitas							
		Strategi: Meningkatkan upaya pemenuhan jumlah, jenis, kompetensi, mutu dan distribusi tenaga kesehatan secara berkeadilan						
		Arah Kebijakan: 1) Peningkatan jumlah, jenis, kompetensi dan kualitas tenaga kesehatan serta pendistribusian di sarana kesehatan; 2) Peningkatan pemberian bantuan pendidikan bagi Nakes untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kompetensinya, yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah; 3) Penambahan tenaga dokter dan bidan PTT untuk memenuhi kebutuhan daerah terpencil dan pedalaman	Rasio Dokter per satuan Penduduk	0,104	0,168	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Rasio Bidan per satuan Penduduk	1,02	1,35		Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Rasio Perawat per satuan Penduduk	1,42	1,42		Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>ourcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2019)			
4.	Sasaran 4: BLUD RSUD Ende Mandiri dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat							
		Strategi: Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan RSUD yang berkualitas kepada masyarakat						
		Arah Kebijakan: 1) Peningkatan kualitas manajemen dan mutu pelayanan RSUD Ende; 2) Pengembangan layanan kesehatan spesialisistik menuju rumah sakit rujukan daratan Flores Lembata;	Bed Occupancy Rate (BOR)	53,93 %	71,83 %	1. Program Pelayanan BLUD; 2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah sakit/rs jiwa/ rs paru - paru/rs mata 3. Program pemeliharaan Sarana dan Prasarana rumah sakit/rs jiwa/rs paru - paru/rumah sakit mata	Kesehatan	RSUD
			Average Length of Stay (ALOS)	3,29	3		Kesehatan	RSUD
			Bed Turn Over (BTO)	59,77	55,20		Kesehatan	RSUD
			Turn Over Interval (TOI)	2,81	3		Kesehatan	RSUD
			Gross Death Rate (GDR)	36	6		Kesehatan	RSUD
			Net Death Rate (NDR)	17	1		Kesehatan	RSUD
		3) Peningkatan sarana, prasarana dan ketenagaan menuju rumah sakit rujukan se-daratan Flores-Lembata	Angka Kematian Ibu Melahirkan (150 per 100.000 KH) di RSUD	1,28	1,05	1. Program Pelayanan BLUD; 2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru - paru/rumah sakit mata; 3. Program pemeliharaan Sarana dan Prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru - paru/rumah sakit mata	Kesehatan	RSUD
			Angka Kematian Bayi di RSUD	24,20	17,60		Kesehatan	RSUD
5.	Sasaran 5: Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita							
		Strategi: Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak						
		Arah Kebijakan: 1) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam akselerasi penurunan angka kematian ibu, bayi baru lahir dan anak; dan 2) Memastikan ketersediaan Bidan Desa melalui pendistribusian dan detasharing tenaga Bidan khususnya untuk melayani desa terpencil dan pedalaman	Menurunnya Kasus Kematian Ibu	8	3	1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 3. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100 %	100 %	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	95,01 %	100 %	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>outcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2019)			
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	62,24 %	99,12 %	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	75,89 %	99,16 %	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Angka Kelangsungan Hidup Bayi	15	4	1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita; 4. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Angka Kematian Neonatal (Bayi 0 - 28 hari)	11	5	1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan Kunjungan Bayi	77,87 %	99,16 %	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani	100 %	100 %	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	82,70 %	100 %	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	55,40 %	100 %	1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; 2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit: Pneumonia Balita	14,98 %	100 %	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>ourcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2019)			
6.	Sasaran 6: Meningkatnya Status Gizi Masyarakat							
		Strategi: Mendorong terwujudnya pengambilan keputusan di tingkat desa dan kelurahan dalam penanganan gizi masyarakat						
		<u>Arah Kebijakan:</u> 1) Peningkatan penanganan gizi kurang dan gizi buruk, khususnya bagi bayi dan balita	Persentase Balita Gizi Buruk	0,88 %	0,31 %	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100 %	100 %	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
7.	Sasaran 7: Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat							
		Strategi: Meningkatkan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular						
		<u>Arah Kebijakan:</u> 1) Peningkatan upaya kesehatan masyarakat; dan 2) Peningkatan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular serta penanggulangan penyakit berpotensi KLB.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita (Pasien Baru) Penyakit TBC BTA +	34,27 %	100 %	1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat; 2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100 %	100 %	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit: <i>Acute Flacid Paralysis</i> (AFP)	0,010 %	0,005 %	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	93,30 %	100 %	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit: Diare	73,54 %	100 %	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dan Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam	100 %	100 %	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Angka Kejadian Malaria (per 1.000 penduduk)	24,83	12,88		Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Cakupan Pelayanan Penderita HIV/AIDS	100 %	100 %	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba , PMS termasuk HIV /AIS	Pemerintahan Umum	Bagian Kesra						

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>ourcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2019)			
8.	Sasaran 8: Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin							
		Strategi: Meningkatkan jumlah dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat miskin						
		Arah Kebijakan: 1) Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Puskesmas dan jaringannya serta daerah terpencil, pedalaman dan wilayah perbatasan.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	68,97 %	98,43 %	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin	-	100,00 %	1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		2) Peningkatan layanan rujukan bagi penduduk miskin.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	0,40 %	1,06 %	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
9.	Sasaran 9: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat							
		Strategi: Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat						
		Arah Kebijakan: 1) Peningkatan kualitas air minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan	27,45 %	48,22 %	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		2) Peningkatan jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Meningkatnya Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	3,96 %	10,79 %	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		3) Peningkatan kualitas higienis sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman	Meningkatnya Kualitas Hygienis Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan/Minuman	41,94 %	73,12 %	1. Program Pengawasan Obat dan Makanan; 2. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
10.	Sasaran 10: Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan Swasta							
		Strategi: Melaksanakan kemitraan dengan lembaga swasta dalam mendukung program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai masalah di bidang kesehatan						
		Arah Kebijakan: 1) Melakukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga swasta dalam penyelenggaraan kesehatan di Kab. Ende	Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Swasta dalam Penyelenggaraan Kesehatan di Kabupaten Ende	5	5	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>ourcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2019)			
11.	Sasaran 11: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Kesehatan							
		Strategi: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan						
		<u>Arah Kebijakan:</u> 1) Peningkatan pembangunan dan penguatan kelembagaan Posyandu, Desa Siaga, dan Rumah Tunggu bagi ibu hamil	Rasio Posyandu per Satuan Balita	41,41	72,71	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Program Peningkatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan Desa Siaga Aktif	53,45 %	100 %	Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	BPMPD
						Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
12.	Sasaran 12: Meningkatnya Peserta KB Aktif							
		Strategi: Meningkatkan cakupan pelayanan Keluarga Berencana kepada masyarakat secara berkualitas						
		<u>Arah Kebijakan:</u> 1) Meningkatkan pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di fasilitas Kesehatan	Persentase Akseptor KB	14,16 %	24,66 %	1. Program Keluarga Berencana; 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja; 3. Program Pemasangan Kontrasepsi; 4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dan Pelayanan KB KR; 5. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga; 6. Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu Padu	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BKBKS
			Cakupan Peserta KB Aktif	72,00 %	100 %	1. Program Keluarga Berencana; 2. Program Pelayanan Kontrasepsi; 3. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dan Pelayanan KB KR; 4. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga;		BKBKS

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>ourcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2019)			
						5. Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu Padu		
13.	Sasaran 13: Penurunan Angka Unmet Need							
		Strategi: Meningkatkan pelayanan kepada unmet need						
		Arah Kebijakan: 1) Menjamin ketersediaan perbekalan alat dan obat kontrasepsi; dan 2) Menjamin ketersediaan petugas KB lapangan dan petugas pelayanan medis KB.	Cakupan PUS yang Ingin ber KB Tidak Terpenuhi (unmet need)	16,73 %	2,50 %	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BKBKS
14.	Sasaran 14: Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Tenaga Penyuluh KB							
		Strategi: Meningkatkan jumlah dan kualitas penyuluh KB sesuai standar kebutuhan						
		Arah Kebijakan: 1) Menyediakan tenaga penyuluh KB di kecamatan, desa dan kelurahan; dan 2) Meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh KB di setiap level pelayanan.	Ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 desa/ kelurahan	0,20	0,50	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakatdan Pelayanan KB KR	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BKBKS
			Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan	1,00	1,00	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakatdan Pelayanan KB KR	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BKBKS
15.	Sasaran 15: Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
		Strategi: Meningkatkan kesejahteraan dan pembinaan keluarga peserta KB						
		Arah Kebijakan: 1) Pembinaan keluarga peserta KB; dan 2) Meningkatkan kesejahteraan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I menjadi keluarga Sejahtera.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	32,38 %	26 %	1. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat; 2. Program Pengembangan bahan Imformasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BKBKS

MISI 3 : PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAN PARIWISATA YANG KOMPETITIF DAN BERKELANJUTAN

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>ourcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab		
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir					
1.	Sasaran 1 : Pengembangan Lahan dan Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan									
		Strategi 1: Mempertahankan dan menggantikan luas baku lahan sawah yang beralih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian								
		Arah Kebijakan: 1) Mencetak lahan sawah baru untuk mengimbangi laju alih fungsi lahan dan mendukung ketersediaan lahan.pangan berkelanjutan;	Meningkatnya Luas Lahan Pertanian: Pertanian Lahan basah	8.054 Ha	Meningkat 7,54% dari kondisi awal	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan (Distanak)		
		2) Pemanfaatan lahan tidur; 3) Pengembangan sawah tadah hujan; dan 4) Peningkatan luas areal tanaman pangan, hortikultura dan peternakan melalui optimalisasi lahan	Meningkatnya Luas Lahan Pertanian: Pertanian Lahan Kering	2.100 Ha	Meningkat 30 % dari kondisi awal	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	Distanak		
						Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertanian / Perkebunan	Dishutbun		
		Strategi 2: Meningkatkan produksi dan inovasi hasil pertanian, peternakan dan perkebunan berbasis potensi lokal								
		Arah Kebijakan: 1) Peningkatan kinerja kelembagaan pertanian, perkebunan peternakan dan perikanan; 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner; 3) Peningkatan sarana prasarana pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; 4) Pengembangan usaha pengolahan serta pemasaran produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan; 5) Optimalisasi Penyuluhan Pertanian; 6) Pengembangan pembangunan	Meningkatnya Produktivitas Padi dan Bahan Utama Pangan Lainnya:			1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan; 2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; 3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Pertanian	Distanak		
			a. Padi Sawah b. Padi Ladang c. Jagung d. Ubi Kayu e. Ubi Jalar f. Kacang Kedelai			4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan); 5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan; 6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Ketahanan Pangan	BKP3		
									6,81 Ton/Ha	7,02 Ton/Ha
									2,69 Ton/Ha	2,86 Ton/Ha
									3,41 Ton/Ha	4,32 Ton/Ha
10,56 Ton/Ha	14,15 Ton/Ha									
7,95 Ton/Ha	10,66 Ton/Ha									
1,23 Ton/Ha	1,43 Ton/Ha									

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>ourcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		pertanian berbasis kawasan; dan 7) Meningkatkan pembenahan sistem distribusi dan tataniaga antar wilayah sehingga menjamin kemudahan akses masyarakat terhadap ketersediaan pangan	g. Kacang Tanah	1,52 Ton/Ha	1,76 Ton/Ha			
			h. Kacang Hijau	1,66 Ton/Ha	1,77 Ton/Ha			
			i. Shorgum	1,68 Ton/Ha	2,25 Ton/Ha			
			Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan (7 Komoditi Unggulan Daerah):			1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan; 2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.		
			a. Kelapa	0,80 %	6,60 %		Pertanian	Dishutbun
			b. Kakao	0,22 %	6,00 %		Pertanian	Dishutbun
			c. Jambu Mete	0,16 %	6,50 %		Pertanian	Dishutbun
			d. Kopi	0,26 %	6,50 %		Pertanian	Dishutbun
			e. Kemiri	0,21 %	6,10 %		Pertanian	Dishutbun
			f. Cengkeh	5,37 %	18 %		Pertanian	Dishutbun
			g. Pala	9,09 %	13,50 %		Pertanian	Dishutbun
Strategi 3: Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya dan tangkap serta pengelolaan potensi sumberdaya kelautan								
	<u>Arah Kebijakan:</u> 1) Optimalisasi perikanan tangkap dan perikanan budidaya; 2) Peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan sumber daya kelautan; 3) Peningkatan konsumsi ikan masyarakat; 4) Perlindungan dan Rehabilitasi Sumberdaya Perikanan Budidaya.	Meningkatnya Produksi Ikan	8.431,06 ton	3,80%	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan; 2. Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut; 3. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut Dan Prakiraan Iklim Laut; 4. Program Peningkatan Budaya Kelautan Dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat; 5. Program Pengembangan Perikanan Budidaya; 6. Program Pengembangan Perikanan Tangkap; 7. Program Kajian Kawasan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>outcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar		
			Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan	88,74 %	93,60 %	1. Program Pengembangan Perikanan Budidaya; 2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Kelautan dan Perikanan	DKP
			Meningkatnya Luas Lahan Budi Daya Rumput Laut	1,42 %	3,84 %	Program Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar	Kelautan dan Perikanan	DKP
		Strategi 4: Meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, keragaman, kualitas, dan keamanan pangan						
		Arah Kebijakan: 1) Penanganan daerah rawan pangan dan keamanan konsumsi pangan masyarakat 2) Pengembangan diversifikasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat	Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan	2	3	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Ketahanan Pangan	BKP3
			Ketersediaan Pangan Utama	88,76 %	90 %	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Ketahanan Pangan	BKP3
2.	Sasaran 2 : Meningkatkan Produksi Ternak							
		Strategi: Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil ternak						
		Arah Kebijakan: 1) Peningkatan populasi ternak; 2) Pengembangan lahan pakan ternak masyarakat; 3) Peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk ternak dan sumber daya pembudidaya ternak; dan 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner	Meningkatnya Produksi hasil Ternak:			1. Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular Ternak; 2. Program Peningkatan penerapan Teknologi Peternakan; 3. Program Peningkatan Pemasaran Produksi Hasil Peternakan; 4. Program Peningkatan Produksi Peternakan	Pertanian	Distanak
						Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Ketahanan Pangan	BKP3
			a. Sapi	345.450 kg	30 %			
			b. Kerbau	3.606 kg	30 %			
			c. Babi	70.335 kg	18 %			
			d. Kambing	24.456 kg	15 %			
			e. Ayam	89.517 kg	18 %			
			f. Telur	84.613 kg	18 %			

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>ourcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
3.	Sasaran 3 : Pelestarian Budaya Lokal							
		Strategi: Meningkatkan kajian budaya, kesenian tradisional dan peninggalan sejarah budaya lokal						
		<u>Arah Kebijakan:</u> 1) Aktualisasi, pengembangan, dan pelestarian adat dan seni budaya daerah; dan 2) Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	10 buah	16 buah	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar)
4.	Sasaran 4 : Meningkatnya Pembinaan Kelompok Seni Budaya Lokal							
		Strategi: Meningkatkan pembinaan lembaga/ kelompok seni dan budaya						
		<u>Arah Kebijakan:</u> 1) Pembinaan lembaga/ kelompok seni budaya	Cakupan Bina Kelompok Seni Budaya Daerah	12,07 %	100 %	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kebudayaan	Disbudpar
5.	Sasaran 5 : Pengembangan Pariwisata Daerah							
		Strategi 1: Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata						
		<u>Arah Kebijakan 1:</u> 1) Pelaksanaan sepekan Pesta Danau Kelimutu yang menjadi momentum dalam pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, sejarah) dalam konteks destinasi wisata. 2) Optimalisasi promosi kepariwisataan melalui berbagai media	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	-	6 kali	Pengembangan Kemitraan	Kebudayaan	Disbudpar
			Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan	20 %	75 %	Program Pengembangan Destinasi	Pariwisata	Disbudpar
		Strategi 2: Meningkatkan manajemen dan rencana pengelolaan pariwisata daerah						
		<u>Arah Kebijakan:</u> 1) Pembenahan obyek wisata unggulan; dan 2) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan	Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	4,63 %	51,85 %	Program Pengembangan Destinasi	Pariwisata	Disbudpar

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>ourcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		Strategi 3: Meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah						
		<u>Arah Kebijakan:</u> 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung kepariwisataan	Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	4,63 %	51,85 %	Program Pengembangan Destinasi	Pariwisata	Disbudpar
			Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan	20 %	75 %	Program Pengembangan Destinasi	Pariwisata	Disbudpar
6.	Sasaran 6 : Meningkatkan Pembinaan Kelompok Tani dan Nelayan							
		Strategi: Meningkatkan kapasitas kelembagaan usaha kelompok tani dan nelayan						
		<u>Arah Kebijakan:</u> 1) Peningkatan kegiatan usaha kelompok tani dan nelayan, produksi, produktivitas, diversifikasi produk, mutu serta nilai tambah produk usaha; dan 2) Pembinaan usaha pengolahan hasil ikan dan produksi pangan lokal	Cakupan Bina Kelompok Tani yang Meningkat Statusnya	55,82 %	82,62 %	1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; 2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan;	Ketahanan Pangan	BKP3
						3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; 4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Pertanian	Distanak
						5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; 6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan; 7. Program Pengembangan Sarana Prasarana Penyuluh	Pertanian/ Perkebunan	Dishutbun
			Cakupan Bina Kelompok Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah serta Pemasar Hasil Perikanan	6,38 %	100 %	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Kelautan dan Perikanan	DKP
7.	Sasaran 7 : Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM							
		Strategi 1: Meningkatkan manajemen koperasi dan UMKM Strategi 2: Mengembangkan skala usaha koperasi dan UMKM Strategi 3: Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Strategi 4: Meningkatkan keterampilan dan kewirausahaan pelaku usaha (kemampuan manajerial, kualitas produk, pakcaging, TTG, dll) Strategi 5: Meningkatnya peran koperasi dalam mendukung usaha kecil dan ekonomi rakyat						
		<u>Arah Kebijakan:</u> 1) Peninokatan kapasitas koperasi	Persentase Koperasi Aktif	80,95 %	87,62 %	Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi	Koperasi dan UKM	Dinkop dan UMKM

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>ourcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		dan pelaku UMKM; dan 2) Penyediaan prasarana dan sarana dan perluasan akses permodalan 3) Penyediaan tempat usaha dan peningkatan kerjasama serta kemitraan koperasi dan UMKM; 4) Peningkatan kapasitas pengurus LKM; dan 5) Pengembangan permodalan LKM; 6) Peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM 7) Peningkatan keterampilan pelaku usaha dan mendorong semangat kewirausahaan pelaku usaha	Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif	54,74 %	61,31 %	1. Program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif; 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan komperatif KUKM 3. Program Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah	Koperasi dan UKM	Dinkop dan UMKM
			Persentase UMKM yang Dibina	5,31 %	6,53 %		Koperasi dan UKM	Dinkop dan UMKM
			Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri	34,51 %	50,44 %		Koperasi dan UKM	Dinkop dan UMKM
8.	Sasaran 8 : Pengembangan dan Pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif							
		Strategi 1: Meningkatkan daya saing industri Strategi 2: Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang Strategi 3: Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan						
		Arah Kebijakan: 1) Peningkatan unit usaha industri mikro/rumah tangga, kecil dan menengah dan usaha ekonomi kreatif serta kemitraan antar industri; 2) Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dan kelompok IKM; 3) Peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan (industri kreatif)	Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah	17,35 %	50,88 %	1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; 2. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)
			Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal	14,19 %	19,00 %	1. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri; 2. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Perdagangan	Disperindag

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>outcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		4) Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan menata distribusi barang yang efektif dan efisien 5) Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Perdagangan dan Industri serta Peredaran Barang dan Jasa	100 %	100 %	Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan	Perindustrian dan Perdagangan	Disperindag
9.	Sasaran 9 : Penyediaan Payung Hukum untuk Mendukung Investasi							
		Strategi: Menyediakan payung hukum untuk kepastian berusaha						
		Arah Kebijakan: 1) Penyediaan payung hukum di tingkat daerah untuk menjamin kepastian berusaha serta mendukung iklim investasi berusaha	Penyediaan Regulasi yang mendukung iklim investasi	0	2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penanaman Modal	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD)
10.	Sasaran 10 : Meningkatnya akses terhadap Informasi Perdagangan dan Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa							
		Strategi: Mengembangkan sistem informasi perdagangan dan lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa						
		Arah Kebijakan: 1) Penyediaan unit informasi harga komoditi perdagangan	Penyediaan Informasi Perdagangan Komoditi Tingkat Kabupaten Ende	0	21 unit	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan	Disperindag
		2) Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	2,35 %	100 %	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pemberd. Masyarakat	BPMPD
11.	Sasaran 11 : Penyediaan dan Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat yang Berkualitas							
		Strategi: Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang mampu mandiri dan bersaing dalam pasar tenaga kerja						
		Arah Kebijakan: 1) Meningkatkan ketrampilan dan kapasitas pekerja; 2) Perbaikan layanan dan sistem informasi ketenagakerjaan;	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	79,21 %	84,09 %	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja	Disnakertrans
			Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	12,24 %	13,38 %	1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja; 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja	Disnakertrans
			Tingkat Pengangguran Terbuka	2,84 %	0,24 %	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja	Disnakertrans

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>ourcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
12.	Sasaran 12 : Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan							
		Strategi: Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan pekerja						
		Arah Kebijakan: 1) Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja; 2) Memberikan perlindungan tenaga kerja anak, orang muda dan wanita; 3) Perlindungan tenaga kerja ke luar negeri.	Persentase Keselamatan dan Perlindungan Kerja	37,20 %	87,20 %	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Disnakertrans
		4) Memberikan Jaminan sosial tenaga kerja.	Persentase Pekerja yang Menjadi Peserta Program Jamsostek/BPJS Tenaga Kerja	62,76 %	67,42 %	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Disnakertrans
		5) Perlindungan pengupahan 6) Penegakan hukum dan pengawasan ketenagaker	Persentase Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Disnakertrans
			Persentase Penurunan Kasus Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun	4,11 %	1,21 %	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Disnakertrans
13.	Sasaran 13 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)							
		Strategi: Meningkatkan sumber-sumber pendapatan PAD						
		Arah Kebijakan: 1) Peningkatan pajak dan retribusi daerah; dan 2) Peningkatan investasi di daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	7,434 Milyard	Meningkat 12% dari kondisi awal	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintahan Umum	DPPKAD
			Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	5,628 Milayrd	Meningkat 12% dari kondisi awal		Pemerintahan Umum	DPPKAD
			Meningkatnya Investasi di Bidang Industri	1,2875 Milyar	Meningkat 22,03 % dari kondisi awal	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	BKPM
			Meningkatnya Investasi di Bidang Perdagangan	334,759 Milyard	Meningkat 10,47 % dari kondisi awal		Penanaman Modal	BKPM
			Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata	1,210 Milyard	Meningkat 10,47 % dari kondisi awal		Penanaman Modal	BKPM
			Meningkatnya Investasi di Bidang usaha Lainnya	5 Milyard	Meningkat 10,47 % dari kondisi awal		Penanaman Modal	BKPM

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>ourcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
14.	Sasaran 14 : Meningkatkan Kontribusi Sektor terhadap PAD							
		Strategi: Meningkatkan kontribusi PAD sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, perdagangan dan industri						
		Arah Kebijakan: 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber daya yang tersedia untuk peningkatan PAD, dengan tidak membebani masyarakat dan tidak merusak lingkungan; 2) Peningkatan pembinaan pengawasan terhadap sumber penghasil PAD sub sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, perdagangan, insutri dan dan sektor pertambangan (mineral bukan non logam & batuan)	Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD	173.465 juta	30% dari kondisi awal	1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; 2. Program Peningkatan penerapan Teknologi Peternakan; 3. Program Peningkatan Pemasaran Produksi Hasil Peternakan; 4. Program Peningkatan Produksi Peternakan; 5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Pertanian	Distanak
			Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Kelautan dan Perikanan terhadap PAD	35,280 juta	284,66 % dari kondisi awal	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	Kelautan dan Perikanan	DKP
			Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD	20,302 juta	60% dari kondisi awal	Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD	Pariwisata	Disbudpar
			Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD	967,705 juta	30% dari kondisi awal	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Perdagangan, Perindustrian	Disperindag

MISI 4 : MEMBANGUN, MENATA, DAN MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG SECARA KUANTITATIF MAUPUN KUALITATIF SESUAI POTENSI DAN KEBUTUHAN DAERAH YANG RAMAH LINGKUNGAN

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>ourcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1.	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan							
		Strategi: Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat						
		<u>Arah Kebijakan:</u> 1) Peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat 2) Membuka akses jalan bagi desa-desa terisolir untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat;	Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik	31,80 %	38,88 %	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; 2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Pekerjaan Umum	Dinas PU
			Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	62,69 %	69,96 %	1. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 2. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan; 3. Program Pengendalian Banjir; 4. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pekerjaan Umum	Dinas PU
			Persentase Panjang Jalan yang Memiliki drainase/Saluran Pembuangan Air	14,44 %	29,00 %	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Pekerjaan Umum	Dinas PU
			Persentase Drainase dalam keadaan baik	43,71 %	62,26 %	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Pekerjaan Umum	Dinas PU
		3) Meningkatkan fasilitas perlengkapan jalan untuk keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas	Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan a. Rambu b. Marka c. Guard Dril	37,63 % 39,21% 9,33 %	100% 100% 24,33%	1. Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan; 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan; 3. Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas; 4. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Perhubungan	Dinas Perhubungan
			Persentase Uji KIR Kendaraan	73,12 %	100 %	1. Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan; 2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; 3. Program Pengendalian Dan	Perhubungan	Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>outcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						Pengamanan Lalu Lintas; 4. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		
		4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana penunjang transportasi	Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal	85,71%	100 %	1. Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan; 2. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Perhubungan	Dinas Perhubungan
2. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan								
		Strategi : Membangun dan Meningkatkan kondisi jembatan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat						
		Arah Kebijakan: 1) Pembangunan dan Peningkatan kondisi jembatan untuk mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat	Jumlah jembatan yang dibangun	53,97 %	63,49 %	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas PU
			Jumlah jembatan dalam kondisi baik	53,97 %	63,49 %	1. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 2. Program Pengendalian Banjir; 3. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pekerjaan Umum	Dinas PU
3. Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Air Irigasi untuk Pertanian								
		Strategi : Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air						
		Arah Kebijakan: 1) Peningkatan konservasi sumber daya air; 2) Peningkatan pendayagunaan sumber daya air; 3) Peningkatan pengendalian daya rusak air; dan 4) Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi	Rasio jaringan Irigasi terhadap luas lahan pertanian	6,11	7,71	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya	Pekerjaan Umum	Dinas PU
			Panjang irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	32,07 %	40,47 %	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya	Pekerjaan Umum	Dinas PU
4. Sasaran 4 : Meningkatnya Akses Listrik untuk Masyarakat								
		Strategi 1: Meningkatkan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan Strategi 2: Mengembangkan sumber Energi Terbarukan (ET)						

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>ourcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		Arah Kebijakan: 1) Peningkatan akses listrik untuk masyarakat khususnya di perdesaan 2) Pengembangan dan pemanfaatan Energi Terbarukan (ET) yang tersedia, khususnya energi air (PLTM), dan energi matahari (PLTS)	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik	67,19 %	77,39 %	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Energi	Distamben
			Persentase Desa yang terakses Listrik	62,75 %	85,88 %	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Energi	Distamben
5. Sasaran 5 : Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat								
		Strategi : Mengembangkan sistem pendistribusian air bersih untuk masyarakat						
		Arah Kebijakan: 1) Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan dan distribusi air bersih bagi masyarakat perkotaan; 2) Pembangunan sarana dan prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan; 3) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sarana air bersih	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih:					
			a. Sumber Mata Air Permukaan	82,65 %	97,95 %	1. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku; 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelola-an Air Minum dan Air Limbah 3. Program Lingkungan Sehat Perumahan	Pekerjaan Umum dan Perumahan	Dinas PU
			b. Sumber Mata Air Bawah Tanah	1,91%	5,34 %	1. Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan; 2. Program pengawasan dan penertiban kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Sumber Daya Mineral	Distamben
			Presentase desa yang terakses air bersih	83,14 %	94,90 %	1. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku; 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelola-an Air Minum dan Air Limbah; 3. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; 4. Program Lingkungan Sehat Perumahan.	Pekerjaan Umum dan Perumahan	Dinas PU
6. Sasaran 6 : Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat								
		Strategi : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan layak huni bagi masyarakat						

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		Arah Kebijakan: 1) Pemberian bantuan stimulan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dengan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat terhadap bahan-bahan lokal	Rasio rumah layak huni	64,33 %	68,97 %	1. Program Lingkungan Sehat Perumahan; 2. Program Pembangunan Perumahan Rakyat 3. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 4. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 5. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Pekerjaan Umum dan Perumahan Transmigrasi Perencanaan Pembangunan	Dinas PU Disnakertrans Bappeda
7.	Sasaran 7 : Meningkatnya Sanitasi Lingkungan di Perumahan Warga							
		Strategi 1: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sanitasi lingkungan Strategi 2: Memberdayakan masyarakat dalam membangun sarana dan prasarana sanitasi yang berkualitas						
		Arah Kebijakan: 1) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sanitasi lingkungan yang bersifat komunal bagi masyarakat; 2) Melaksanakan STBM dalam berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan sanitasi dan lingkungan; 3) Pemberdayaan masyarakat dlm pembangunan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan yg berkualitas; 4) Mendorong pembangunan jamban keluarga untuk setiap rumah tangga dan gerakan stop buang air besar sembarangan (Stop BABS)	Persentase rumah tinggal yang memiliki jamban keluarga	38,34 %	40,49 %	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Pekerjaan Umum	Dinas PU
8.	Sasaran 8 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana Pengelolaan Persampahan							
		Strategi: Meningkatkan sistem pengelolaan dan pengolahan persampahan						
		Arah Kebijakan: 1) Penyediaan sarana dan prasarana TPS dan TPA untuk	Penyediaan TPA	-	1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Kantor Pertamanan dan Kebersihan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>ourcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		menampung sampah rumah tangga dan pengolahan sampah perkotaan;	Presentase Penanganan Sampah	70,58 %	85,97 %	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	BLHD
		2) Peningkatan peran dan fungsi bank sampah; dan				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Kantor Pertamanan dan Kebersihan
		3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	25,01 %	92,16 %	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	BLHD
						Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Kantor Pertamanan
9.	Sasaran 9 : Meningkatkan Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan							
		Strategi: Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing						
		Arah Kebijakan: 1) Pengendalian pembangunan perkotaan sesuai dengan peruntukkan lahan; 2) Pengendalian penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau khususnya yang ada di kawasan perkotaan; dan	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	1,80 %	4,02 %	1. Program Perencanaan Tata Ruang; 2. Program Pemanfaatan Ruang; 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;	Pekerjaan Umum	Dinas PU
						4. Program Perencanaan Tata Ruang; 5. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	Bappeda
		3) Peningkatan kinerja perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik	12,29 %	12,34 %	1. Program Perencanaan Tata Ruang; 2. Program Pemanfaatan Ruang; 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pekerjaan Umum	Dinas PU
						4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau		Kantor Pertamanan
						5. Program Perencanaan Tata Ruang; 6. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	Bappeda
10.	Sasaran 10 : Meningkatkan Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan							
		Strategi: Meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup						

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>outcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		Arah Kebijakan: 1) Pengawasan dan penertiban perusahaan yang belum memiliki dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL)	Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL)	8 %	96 %	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)
		2) Pengendalian pencemaran air baku untuk kebutuhan masyarakat;	Persentase Pencemaran status mutu air	62,50 %	12,50 %	1. Program Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup; 2. Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Lingkungan Hidup	BLHD
		3) Peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati 4) Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya air dan kawasan pesisir serta laut	Cakupan Penghijauan Wilayah Sumber Mata Air	64,71 %	100 %	1. Program Perlindungan dan Konservasi SD. Alam; 2. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam; 3. Program Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	BLHD
			Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	1,15 %	2,94 %	1. Program Pemanfaatan Potensi SD. Hutan; 2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 3. Program Peningkatan Fungsi Hutan Mangrove dan Hutan Permai	Kehutanan	Dishutbun
			Persentase Kerusakan Kawasan Hutan	0,17 %	0,12 %	1. Program Perlindungan dan Konservasi SD. Hutan; 2. Program Peningkatan Fungsi Hutan Mangrove dan Hutan Permai	Kehutanan	Dishutbun
		5) Membatasi ijin pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan; dan 6) Penertiban lokasi pertambangan liar yang mengancam kerusakan lingkungan	Persentase Penertiban Lokasi Pertambangan Tanpa Ijin	35 %	100 %	1. Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan; 2. Program pengawasan dan penertiban kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Sumber Daya Mineral	Distamben

MISI 5 : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN BERKUALITAS SERTA RASA AMAN, TERTIB DAN NYAMAN BAGI PENGEMBANGAN USAHA DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>ourcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1.	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah							
		Strategi 1: Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara tepat waktu						
		Strategi 2: Meningkatkan Keselarasan, Integrasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi pelaksanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan						
		Arah Kebijakan: 1) Peningkatan kualitas tenaga perencana; 2) Meningkatkan kualitas musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten; 3) Penyelenggaraan e- <i>Government</i> di lingkup penyelenggara Pemerintahan Daerah; 4) Membangun kerjasama dengan Badan Pusat Statistik bersama SKPD terkait untuk menyediakan data statistik daerah yang berkualitas dan tepat waktu; 5) Peningkatan komitmen dan ketaatan terhadap dokumen perencanaan; 6) Peningkatan pengendalian dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.	Persentase kegiatan yang ditetapkan dalam APBD berbanding kegiatan yang direncanakan dalam RKPD	49 %	100 %	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD, RKPD, KUA, PPAS)	100 %	100 %	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Penyampaian Dokumen Perencanaan (RKPD,KUA,PPAS) secara tepat waktu	100%	100 %	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Penyediaan Data Statistik Daerah (Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil Daerah)	100 %	100 %	1. Program Pengembangan Data/Informasi; 2. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Statistik	Bappeda
			Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan	100 %	100 %	1. Program Kerjasama Pembangunan; 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 4. Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2.	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah							
		Strategi: Pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel						
		Arah Kebijakan: 1) Peningkatan kualitas tenaga pengelola keuangan daerah; dan 2) Penyediaan dokumen dan laporan keuangan tepat waktu.	Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan	100 %	100 %	1. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Pemerintahan Umum	DPPKAD

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>outcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			Persentase SKPD yang menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu	62,34 %	100 %	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintahan Umum	DPPKAD
			Berkurangnya Temuan Audit BPK	100 %	48,57 %	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintahan Umum	DPPKAD
3.	Sasaran 3 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas							
		Strategi: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien						
		Arah Kebijakan: 1) Peningkatan kualitas aparatur; 2) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur; 3) Peningkatan jumlah SKPD yang memiliki Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan 4) Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Badan/Dinas/ Kantor yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik	100 %	100 %	1. Program Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah;	Pemerintahan Umum	Bagian Pemerintahan Umum
						2. Program rutin pelayanan perkantoran yang ada pada setiap SKPD	Pemerintahan Umum	Kecamatan
			Penyampaian LLPD kepada Pemerintah Pusat Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pemerintahan Umum	Bagian Pemerintahan Umum
			Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan administrasi dengan baik	100 %	100 %	Program rutin pelayanan perkantoran yang ada pada setiap SKPD	Pemerintahan Umum	Kecamatan
			Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik	100 %	100 %	Program Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah	Pemerintahan Umum	Bagian Pemerintahan Umum
						Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (Kecamatan)	Pemerintahan Umum	Kecamatan
			Persentase Desa dan Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik	16,19 %	100 %	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemerintahan Desa	BPMPD
						Program rutin pelayanan perkantoran yang ada pada setiap SKPD	Pemerintahan Umum	Kelurahan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>outcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			Persentase Desa dan Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaks. Pembangunan dan Kemasyarakatan dgn Baik	14,39 %	100 %	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemerintahan Desa	BPMPD
			Persentase SKPD yang telah Memiliki SPM/SOP	12,73 %	33,64 %	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Pemerintahan Umum	Bagian Organisasi
			Pengelolaan Arsip secara Baku	14,12 %	28,24 %	Program Penyelamatan & Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Kearsipan	KPKD
			Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	14 %	100 %	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Kearsipan	KPKD
			Persentase SKPD yang Memiliki Akses Internet	55 %	100 %	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa;	Kominfo	KPDT
			Persentase SKPD yang Memiliki Website	6 %	100 %	Program Fasilitasi Peningkatan Sdm Bidang Komunikasi Dan Informasi	Kominfo	KPDT
			Persentase Dokumen Perijinan yang Diselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan yang Ditetapkan	51,70 %	100,00 %	Program Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Perijinan	Pemerintahan Umum	KPTSP
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan yang Diperoleh	74,11%	82,50%	Program Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Perijinan	Pemerintahan Umum	KPTSP
			Persentase kegiatan dalam RUP yang dilaksanakan melalui LPSE	90,91 %	100 %	Program Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah;	Pemerintahan Umum	Bagian Pembangunan
			Ranperda yang Diajukan dan Ditetapkan menjadi Perda	22,22 %	100 %	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Pemerintahan Umum	Bagian Hukum
			Persentase Perda yang Disosialisasikan kepada Masyarakat	-	100 %	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Pemerintahan Umum	Bagian Hukum
			Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan	100 %	100 %	1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;	Pemerintahan Umum	Bagian Umum
						2. Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Pemerintahan Umum	Bagian Pemerintahan Umum
						3. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		
						4. Program Pelayanan Urusan Haji	Pemerintahan Umum	Bagian Kesra

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>ourcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawa		
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir					
			Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang Dipublikasikan	68 %	100 %	1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; 2. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Pemerintahan Umum	Bagian Humas		
			Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Komunikasi dan Informasi	KPDT					
				Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang Dipublikasikan	50 %	100 %	1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; 2. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Pemerintahan Umum	Bagian Humas	
			Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Komunikasi dan Informasi	KPDT					
		5) Peningkatan sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP); 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengawas penyelenggaraan pemerintah;		Persentase Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100 %	70 %	Peningkatan sistim pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pemerintahan Umum	Inspektorat Daerah	
			Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan	66,33 %	100 %	Peningkatan sistim pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pemerintahan Umum	Inspektorat Daerah		
			Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah	27,69 %	64,62 %	Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pemerintahan Umum	Inspektorat Daerah		
			Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah yang Berkompeten	18,46 %	73,85 %	Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pemerintahan Umum	Inspektorat Daerah		
			4. Sasaran 4 : Penguatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah							
					Strategi: Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terhadap kinerja DPRD					
Arah Kebijakan: 1) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja DPRD; dan 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan dewan	Perda yang dihasilkan	17 %			100 %	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Otonomi Daerah	Sekratriat Dewan		
	Kegiatan Reses yang Dilaksanakan	94 %			100 %		Otonomi Daerah	Sekratriat Dewan		
	Kegiatan Pansus yang Dilaksanakan	100 %			100 %		Otonomi Daerah	Sekratriat Dewan		
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan yang Dilaksanakan	100 %			100 %		Otonomi Daerah	Sekratriat Dewan		
5. Sasaran 5 : Terpenuhinya Kebutuhan PNS sesuai Kompetensi										
		Strategi: Peningkatan kuantitas dan kualitas PNS								

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>ourcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawa
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		Arah Kebijakan: 1) Peningkatan pendidikan dan pelatihan kepegawaian; 2) Penerimaan PNS berdasarkan analisis kebutuhan; 3) Penempatan PNS pada jabatan sesuai kompetensi yang dimiliki; dan 4) Peningkatan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja	Persentase Pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	35,41 %	70,74 %	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kepegawaian	BKD
			Persentase Struktur Jabatan yang Terisi	83,63 %	100 %	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kepegawaian	BKD
6. Sasaran 6 : Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak								
		Strategi: Meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta meningkatkan perlindungan perempuan dan anak						
		Arah Kebijakan: 1) Peningkatan advokasi kualitas hidup perempuan dan anak; 2) Memperkuat koordinasi dengan SKPD terkait, kelembagaan dan jaringan PUG; 3) Peningkatan taraf pendidikan dan ketrampilan untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan dan anak; 4) Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak (<i>trafficking</i>)	Persentase Kasus KDRT	0,11 %	0,05 %	1. Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan; 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengerasutamaan Gender dan Anak; 3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; 4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Pemberdayaan Perempuan	Bagian Pemberdayaan Perempuan
			Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	97,32 %	99 70 %	1. Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan; 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan kesetaraan gender dan anak; 3. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.	Pemberdayaan Perempuan	Bagian Pemberdayaan Perempuan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>ourcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawa
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	86,57 %	100 %	1. Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan; 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengerasutamaan Gender dan Anak; 3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; 4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.	Pemberdayaan Perempuan	Bagian Pemberdayaan Perempuan
7.	Sasaran 7 : Meningkatkan Perlindungan Sosial Kemasyarakatan							
		Strategi 1: Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial Strategi 2: Meningkatkan ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakat						
		Arah Kebijakan: 1) Validasi data kemiskinan daerah untuk dijadikan acuan bagi SKPD terkait dalam merencanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan; dan 2) Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, dan PMKS	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	38,42 %	50,33 %	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya; 2. Program Pembinaan Anak Terlantar; 3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma; 4. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Sosial	Dinas Sosial
			Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	15,50 %	21,50 %		Sosial	Dinas Sosial
8.	Sasaran 8 : Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana							
		Strategi: Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan program penanggulangan bencana daerah berdasarkan rencana strategis yang terkoordinasi dan tepat sasaran						
		Arah Kebijakan: 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM penanggulangan bencana daerah; 2) Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanggulangan bencana; 3) Peningkatan kualitas dokumen Rencana Penanggulangan Kebencanaan	Presentase Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat	100 %	100 %	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial
			Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan (RPBD, RADPRB, Protap, Renkon, ROTD, RA Rehab & Rekon)	-	100 %	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Sosial	Badan Penanggula- ngan Bencana Daerah (BPBD)

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>ourcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawa
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		4) Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana alam, yang meliputi: penanganan pra bencana, bencana dan penanganan pasca bencana; dan 5) Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana	Desa/Kelurahan Siaga Bencana yang Aktif	8,27 %	38,13 %	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Sosial	BPBD
			Penanggulangan Daerah Resiko Bencana	100 %	100 %	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Sosial	BPBD
9.	Sasaran 9 : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Karakter Masyarakat yang Pancasila							
		Strategi: Membangun karakater masyarakat untuk mencapai cita-cita dan tujuan bersama tanpa memandang perbedaan etnis, ras, agama dan golongan						
		Arah Kebijakan: 1) Membangun suasana dialogis antara pemerintah dengan semua komponen sosial politik di dalam upaya pemahaman ideologi bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; 2) Peningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai luhur Pancasila; dan 3) Melaksanakan prosesi kebangsaan hari lahir Pancasila setiap tahun	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1	6	1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpolinmas
			Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	3	18	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpolinmas
			Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaaan dan hari besar Nasional	1	12	1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan' 2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpolinmas
						3. Program Pengelolaan areal pemakaman; 4. Program Pendukung Pelaksanaan Hari-hari Besar Kenegaraan	Sosial	Dinas Sosial
10.	Sasaran 10 : Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat							
		Strategi: Membangun kesadaran masyarakat untuk berperan aktif demi terciptanya Ketentraman dan Ketertiban umum						

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>ourcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawa
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		Arah Kebijakan: <ul style="list-style-type: none">Melaksanakan pembinaan sosial kemasyarakatan untuk menciptakan suana aman, tertib dan damai;Menciptakan dan mengendalikan sistem keamanan dan ketertiban umum	Menurunnya Kasus Konflik Sosial yang terjadi	5	1	1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; 2. Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;	Kesbangpoldam	Badan Kesbangpolinmas
						4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; 5. Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal	Kesbangpoldam	Satpol PP
			Presentase Kasus Konflik Sosial yang Diselesaikan	80 %	100 %	1. Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; 2. Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal	Kesbangpoldam	Badan Kesbangpolinmas
			Menurunnya Kasus Pelanggaran terhadap Perda	5	1	Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal	Kesbangpoldam	Saipol PP
			Persentase Pelanggaran terhadap Perda yang Diselesaikan	100 %	100 %	Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal	Kesbangpoldam	Saipol PP
11.	Sasaran 11 : Sertifikasi Tanah Milik Pemda dan Masyarakat							
		Strategi 1: Meningkatkan kesigapan pemerintah dan kesadaran masyarakat tentang manfaat sertifikat						
		Strategi 2: Pensertifikatan tanah milik pemda dan masyarakat						
		Arah Kebijakan: 1) Penyediaan data akurat kepemilikan tanah pemerintah dan tanah masyarakat; dan 2) Membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarat tentang pengurusan sertifikat tanah; 3) Melaksanakan sertifikasi tanah milik Pemda; dan 4) Stimulan bagi penyediaan sertifikat tanah masvarakat	Persentase Tanah Milik Pemda yang Dilakukan Sertifikasi	56,17 %	84,94 %	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Pertanahan	Bagian Pemerintahan Umum
Persentase Tanah Milik Masyarakat yang Dilakukan Sertifikasi	-		350	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Pertanahan	Bagian Pemerintahan Umum		

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>ourcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawa
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
12.	Sasaran 12 : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Masyarakat							
		Strategi: Menjamin jumlah kepemilikan dokumen kependudukan						
		<u>Arah Kebijakan:</u> 1) Menyediakan dokumen kependudukan dan peningkatan kualitas pelayanan	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	71,79 %	99 %	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kependudukan dan Catatan Sipil	Dispenduk dan Capil
			Persentase Bayi ber-Akte Kelahiran	7,77 %	95 %			
			Rasio Pasangan ber-Akte Nikah	29,50 %	95,23 %			
			Kepemilikan Akta Kelahiran	43,82 %	94,84 %			
			Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten	Ada	Ada			
13.	Sasaran 13 : Meningkatnya Kerjasama Penelitian dengan Lembaga Perguruan Tinggi							
		Strategi: Meningkatkan kerjasama Penelitian antara Pemerintah dengan Lembaga Perguruan Tinggi						
		<u>Arah Kebijakan:</u> 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian terhadap permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan 2) Menindaklanjuti hasil penelitian ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah	Kerjasama Penelitian yang Dilaksanakan	2	11	Program Kerjasama Pembangunan	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Penelitian yang Dilaksanakan	100 %	100 %	Program Kerjasama Pembangunan	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
14.	Sasaran 14 : Meningkatnya Kerjasama Pembangunan dengan Perusahaan/ Asosiasi/Lembaga Swasta							
		Strategi: Meningkatkan dukungan Perusahaan / Asosiasi / Lembaga Swasta dalam mengatasi permasalahan daerah						
		<u>Arah Kebijakan:</u> 1) Melakukan kerjasama pendampingan Perusahaan / Asosiasi / Lembaga Swasta terhadap proses pembangunan yang dilaksanakan di tingkat masyarakat; 2) Peningkatan akses masyarakat terhadap cost sosial responsibility (CSR) perusahaan / lembaga swasta	Jumlah Kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga Swasta/Asosiasi	20 %	40 %	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Penenaman Modal	BKPM

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>ourcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawa
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
15.	Sasaran 15 : Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Daerah							
		Strategi 1: Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kelembagaannya dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah						
		Arah Kebijakan: 1) Peningkatan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)	Persentase PKK Aktif	67 %	100 %	1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; 2. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Pemberdayaan Masyarakat	BPMPD
			2) Peningkatan pembinaan di bidang sosial kemasyarakatan, dan lembaga mikro ekonomi yang ada di masyarakat	Persentase Posyandu Aktif	100 %		100 %	Pemberdayaan Masyarakat
				Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4,36 %	20,33 %	1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; 2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; 3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Pemberdayaan Masyarakat
		Strategi 2: Melaksanakan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Adat dalam mendukung pembangunan daerah						
		Arah Kebijakan: 1) Peningkatan koordinasi kolaborasi <i>Lika Mboko Telu / Tiga Batu Tungku</i> (Pemerintah dan Rakyat, Agama dan Ulayat, <i>Mosalaki</i> dan <i>Faiwalu Anakalo</i>)	Pertemuan dengan Tokoh Agama	-	12	Program Solidaritas Kerukunan Antar Umat Beragama	Pemerintahan Umum	Bagian Kesra
			Pertemuan dengan Tokoh Adat	-	6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Pemerintahan Umum	Bagian Pemerintahan Umum
		16.	Sasaran 16 : Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dan Kelurahan					
		Strategi: Memberi ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa						
		1) Peningkatan anggaran pembangunan untuk desa dan kelurahan 700 juta sampai dengan 1 (satu) milyar untuk masing-masing Desa dan Kelurahan; 2) Peningkatan kemandirian masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan melalui kegiatan yang	Persentase Desa & Kelurahan yang Mendapatkan Alokasi Anggaran Pembangunan APBD Kabupaten sebesar Rp.700 juta sampai dengan Rp.1 milyar per Desa/Kelurahan	-	100 %	Program Kerjasama Pembangunan	Perencanaan Pembangunan	Bappeda

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>outcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		<p>diswakelola kepada masyarakat;</p> <p>3) Mendorong pemberdayaan individu, kelompok dan</p> <p>4) Peningkatan peran dan fungsi lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa</p>						

7.3. Program Unggulan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 – 2019

Mengacu kepada Visi Pembangunan Kabupaten Ende, yang menitikberatkan pembangunan ke desa dan kelurahan secara merata dan berkeadilan, maka untuk mempercepat langkah-langkah strategis pencapaian sasaran, dilaksanakan Program Unggulan Daerah untuk membangun Bumi Kelimutu, adalah

“Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P3DK)”

Pada tataran pelaksanaan fokus prioritas dengan melaksanakan **“*Tiwu Telu Pembangunan Kabupaten Ende*”**, yang dilakukan dengan mendayagunakan **“*Model Segitiga Membangun Kabupaten Ende*”**,

Prioritas program unggulan daerah ini akan menjadi acuan bagi seluruh SKPD dalam merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta acuan masyarakat dalam mengusulkan program dan kegiatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dilaksanakan dari tingkat dusun/lingkungan/desa, dan kecamatan.

Penjabaran dari program P3DK, dengan melaksanakan **“*Tiwu Telu Pembangunan Kabupaten Ende*”**, antara lain:

1. Proporsi alokasi pendanaan berbasis desa dan kelurahan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Belanja Langsung APBD Kabupaten Ende untuk masing-masing desa dan kelurahan dalam bentuk Pagu Indikatif Desa (PIDES) dan Pagu Indikatif Kelurahan (PIKEL), untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapinya, dalam konteks peningkatan kapasitas, pengembangan ekonomi masyarakat dan peningkatan infrastruktur penunjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pendekatan *Bottom-up dan Partisipatif*.
 - Alokasi PIDES dan PIKEL yang dianggarkan menjadi acuan bagi masing-masing desa dan kelurahan dalam mengusulkan program dan kegiatan yang akan didanai melalui dana APBD Kabupaten Ende melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat dusun/lingkungan, desa/kelurahan dan kecamatan;
 - Pada tahun awal pelaksanaan yaitu tahun 2015, seluruh program dan kegiatan usulan masyarakat yang merupakan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tersebut, akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - Pada tahap selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, beberapa program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat dilakukan secara swakelola kepada lembaga/organisasi/kelompok-kelompok masyarakat desa dan kelurahan yang disesuaikan dengan kesiapan sumber daya, tingkat partisipasi masyarakat dan aspek pendukung lainnya, yang dikoordinasikan oleh SKPD teknis terkait dengan kegiatan yang di-swakelolakan;

- Alokasi anggaran PIDES dan PIKEL untuk masing-masing desa dan kelurahan tersebut, dengan proporsi:
 - Bidang Prioritas Utama:
 - 1) Pendidikan : 20 %
 - 2) Kesehatan : 10 %
 - 3) Ekonomi dan Pariwisata : 25 %
 - Bidang Prioritas Penunjang:
 - 1) Infrastruktur dan Lingkungan Hidup : 35 %
 - 2) Penataan Birokrasi, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, KUM, HAM dan Kamtib : 10 %
- 2. Pendekatan **Pagu Kewilayahan Kecamatan** dialokasikan untuk menjawab pokok-pokok pikiran DPRD yang dihasilkan dari rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut diintegrasikan dengan seluruh usulan partisipatif masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah untuk selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- 3. Prioritas terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan penguatan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan, yang meliputi:

Program Selasa Keliling – Sabtu Keliling” (Seling-Saling), dalam bentuk dialog dan audiens dengan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat;
- 4. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana pendukung (mess guru dan rumah medis dan paramedis) serta perbedaan besaran tunjangan bagi tenaga struktural dan fungsional yang melayani daerah terpencil, pedalaman dan dalam kota;
- 5. Prioritas terkait percepatan pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui:
 - a) Peningkatan konektivitas antar kecamatan dan antar desa, untuk pendistribusian hasil-hasil produksi pertanian, peternakan, dan perkebunan unggulan masyarakat dengan membangun jalan-jalan paralel sebanyak 5 (lima) ruas jalan, yaitu:
 - Jalan Paralel: Puukungu – Orakose – Maukaro;
 - Jalan Paralel: Nangaba – Boafeo – Kebirangga;
 - Jalan Paralel: Nduaria – kotabaru;
 - Jalan Paralel: Wologai – Magekoba – Maurole;
 - Jalan Paralel: Watuneso – Detupera – Oka – Hangalande – Kotabaru
 - b) Peningkatan akses masyarakat terhadap listrik termasuk pemanfaatan potensi Energi Terbarukan (ET), dengan target semua desa dapat terakses listrik;
 - c) Peningkatan sistem distribusi dan akses terhadap air bersih, baik untuk masyarakat perkotaan maupun perdesaan;
 - d) Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memfasilitasi pengembangan usaha masyarakat di tingkat desa.

6. Penyelenggaraan “**SEPEKAN PESTA DANAU KELIMUTU**”, sebagai media dan momentum untuk mensinergiskan seluruh kekuatan membangun Kabupaten Ende, yang akan menjadi lokomotif bagi pengembangan pariwisata, budaya dan perekonomian masyarakat serta berorientasi kepada pengembangan kapasitas masyarakat dan bermuara pada masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Tabel 7. 2. Kebijakan Umum dan Program Unggulan Daerah

Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan	Indikator Kinerja (outcomes)	Target Kinerja					Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan dan SKPD	
		2015	2016	2017	2018	2011			
Sasaran 1 : PROPORSI ALOKASI PENDANAAN BERBASIS DESA DAN KELURAHAN SEBESAR RP. 700.000.000,-(TUJUH RATUS JUTA RUPIAH) SAMPAI DENGAN RP.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) DARI BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN ENDE UNTUK MASING-MASING DESA DAN KELURAHAN DALAM BENTUK PAGU INDIKATIF DESA (PIDES) DAN PAGU INDIKATIF KELURAHAN (PIKEL)									
Strategi: Memberi ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa									
Arah kebijakan:									
Peningkatan Anggaran pembangunan untuk Desa/Kelurahan 700 juta sd 1 Milyard masing-masing Desa/Kelurahan	Persentase Desa & Kelurahan yang Mendapat Alokasi Anggaran Pembangu-nan APBD Kab. sebesar Rp.700 juta s/d Rp.1 milyar per Desa/ Kel.	75 %	100 %	100%	100%	100%	Program kerja Sama Pembangunan	Perencanaan Pembangunan (Bappeda)	
Sasaran 2 : PENDEKATAN PAGU KEWILAYAHAN KECAMATAN DIALOKASIKAN UNTUK MENJAWAB POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD									
Strategi : Memberi ruang kepada DPRD untuk memberikan pokok-pokok pikiran atas masukan masyarakat yang diperoleh dari rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses									
Arah kebijakan:									
Mengalokasikan Pagu Anggaran Kewilayahan untuk menjawab Pokok-pokok Pikiran DPRD	Alokasi Pagu Anggaran Kewilayahan untuk menjawab Pokok-pokok Pikiran DPRD (Milyard)	6	6,5	7	7,5	8	Program kerja Sama Pembangunan	Perencanaan Pembangunan (Bappeda)	
Sasaran 3 : PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGUATAN PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA DAN KELURAHAN									
Strategi: Melaksanakan kunjungan kerja langsung ke Kecamatan, Desa dan Kelurahan serta ke masyarakat dalam bentuk dialog dan audiens dengan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat									
Arah kebijakan:									
Melaksanakan Program Selasa Keliling- Sabtu Keliling (Seling – Saling)	Persentase pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja: Selasa Keliling dan Sabtu Keliling	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah	Setda Kabupaten Ende	

Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan	Indikator Kinerja (outcomes)	Target Kinerja					Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan dan SKPD
		2015	2016	2017	2018	2011		
Sasaran 4 : PEMENUHAN TERHADAP SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG (MESS GURU DAN RUMAH MEDIS DAN PARAMEDIS) SERTA PERBEDAAN BESARAN TUNJANGAN BAGI TENAGA STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL YANG MELAYANI DAERAH TERPENCIL, PEDALAMAN & DALAM KOTA								
Strategi 1: Menyediakan Insentif dan Sarana Prasarana bagi tenaga pendidik yang bertugas di wilayah terpencil dan pedalaman								
Arah kebijakan:								
Pembangunan sarana perumahan bagi tenaga pendidik di wilayah terpencil dan pedalaman.	Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru Tetap pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman (Total kebutuhan 346 unit)	3%	6%	9%	12%	15%	Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Program Pendidikan Menengah	Pendidikan (Dinas PPO)
Penyediaan tunjangan tambahan bagi tenaga pendidik di wilayah terpencil dan pedalaman	Besaran Tunjangan tambahan yang diberikan bagi tenaga pendidik di wilayah terpencil dan pedalaman (Kategori 1 : Terpencil, Kategori 2 : Pedalaman Dan Kategori 3 : Dalam Kota) Satuan dalam Ribuan Rupiah	K1 : 500	K1 : 600	K1 : 700	K1: 800	K1: 900	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	DPPKAD
		K2: 300	K2: 350	K2: 400	K2: 450	K2: 500		
		K3: 200	K3: 250	K3: 300	K3: 350	K3: 400		
Strategi 2: Menyediakan Insentif dan sarana prasana pendukung bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah terpencil dan pedalaman								
Pembangunan sarana perumahan bagi tenaga medis dan paramedis di wilayah terpencil dan pedalaman	Penyediaan Rumah Medis dan Paramedis di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman (Total Kebutuhan 196 unit)	63,27%	64,29%	65,31%	66,33%	67,35%	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan)
Penyediaan tunjangan tambahan bagi tenaga kesehatan di wilayah terpencil dan pedalaman;	Besaran Tunjangan tambahan yang diberikan bagi tenaga pendidik di wilayah terpencil dan pedalaman (Kategori 1 : Terpencil, Kategori 2 : Pedalaman Dan Kategori 3 : Dalam Kota) Satuan dalam Ribuan Rupiah	K1 : 500	K1 : 600	K1 : 700	K1: 800	K1: 900	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	DPPKAD
		K2: 300	K2: 350	K2: 400	K2: 450	K2: 500		
		K3: 200	K3: 250	K3: 300	K3: 350	K3: 400		

Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan	Indikator Kinerja (outcomes)	Target Kinerja					Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan dan SKPD
		2015	2016	2017	2018	2011		
Strategi 3: Menyediakan Insentif bagi Tenaga Struktural dan Fungsional lainnya yang bertugas di wilayahTerpencil, Pedalaman dan Dalam Kota								
Arah kebijakan:								
Penyediaan tunjangan tambahan bagi Menyediakan Insentif bagi Tenaga Struktural dan Fungsional lainnya sesuai wilayah pelayanan pada daerah Terpencil, Pedalaman dan Dalam Kota.	Besaran tunjangan tambahan yang diberikan bagi Tenaga Struktural dan Fungsional lainnya yang bertugas di wilayah terpencil, pedalaman dan Dalam Kota	K1 : 500	K1 : 600	K1 : 700	K1:800	K1: 900	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	DPPKAD
		K2: 300	K2: 350	K2: 400	K2: 450	K2: 500		
		K3: 200	K3: 250	K3: 300	K3: 350	K3: 400		
Sasaran 5.1 : PENINGKATAN KONEKTIVITAS ANTAR KECAMATAN DAN ANTAR DESA, UNTUK PENDISTRIBUSIAN HASIL-HASIL PRODUKSI PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERKEBUNAN UNGGULAN MASYARAKAT DENGAN MEMBANGUN JALAN-JALAN PARALEL SEBANYAK 5 (lima) RUAS JALAN								
Strategi: Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat								
Arah kebijakan:								
Peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat	Perentase Ruas Jalan paralel yang dibangun dari target 5 ruas jalan paralel	20. %	40%	60%	80%	100%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Urusan Pekerjaan Umum (Dinas PU)
Membuka akses jalan bagi desa-desa terisolir untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat								
Sasaran 5.2 : PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP LISTRIK								
Strategi 1: Meningkatkan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan								
Strategi 2: Mengembangkan sumber Energi Terbarukan (ET)								
Arah kebijakan:								
Peningkatan akses listrik untuk masyarakat khususnya di perdesaan;	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik (kondisi Tahun 2014 : 40.529 atau 68,89%)	70,59%	72,29%	73,99%	75,69%	77,39%	Program Pembinaan dan Pengemban- ngan Bidang Ketenagalis-trikan	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (Distamben)

Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan	Indikator Kinerja (outcomes)	Target Kinerja					Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan dan SKPD
		2015	2016	2017	2018	2011		
Pengembangan dan pemanfaatan Energi Terbarukan (ET) yang tersedia, khususnya energi air (PLTM), dan energi matahari (PLTS)	Persentase Desa yang Terakses Listrik (kondisi Tahun 2014 telah ada sebanyak 169 desa terakses listrik atau 66,27%)	70,20%	74,12%	78,08%	81,96%	85,88%	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (Distamben)
Sasaran 5.3 : PENINGKATAN SISTEM DISTRIBUSI DAN AKSES TERHADAP AIR BERSIH, BAIK UNTUK MASYARAKAT PERKOTAAN MAUPUN PERDESAAN								
Strategi: Mengembangkan sistem pendistribusian air bersih untuk masyarakat								
Arah kebijakan:								
Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan dan distribusi air bersih bagi masyarakat perkotaan	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dari Sumber Air Permukaan (Keadaan Tahun 2014 sebanyak 50.122 RT atau 85,20% terakses air bersih)	87,75%	90,30%	92,85%	95,40%	97,95%	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku, Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Limbah, Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dan Program Lingkungan Sehat Perumahan	Urusan Pekerjaan Umum dan perumahan (Dinas PU)
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dari Sumber Air Bawah Tanah (keadaan Tahun 2014 sebanyak 1.461 RT atau 2,48% terakses air bersih)	3,05%	3,63%	4,20%	4,77%	5,34%	Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan Program Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (Distamben)
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sarana air bersih	Persentase Desa yang Terakses Air Bersih (keadaan Tahun 2014 sebanyak 217 Desa atau 85,10% yang terakses air bersih)	87,06%	89,02%	90,98%	92,94%	94,90%	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku, Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Limbah, Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dan Program Lingkungan Sehat Perumahan	Urusan Pekerjaan Umum dan perumahan (Dinas PU)

Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan	Indikator Kinerja (outcomes)	Target Kinerja					Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan dan SKPD
		2015	2016	2017	2018	2011		
Sasaran 5.4 : MENINGKATNYA AKSES TERHADAP INFORMASI PERDAGANGAN DAN LEMBAGA EKONOMI MIKRO BERBASIS POTENSI DESA								
Strategi: Mengembangkan sistem informasi perdagangan dan lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa								
Arah kebijakan:								
Penyediaan unit informasi harga komoditi perdagangan	Penyediaan Informasi Perdagangan Komoditi Tingkat Kabupaten Ende (pengembangan unit informasi perdagangan) Satuan Unit	1	2	7	7	4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Urusan Perdagangan (Disperindag)
Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes	Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) - Kondisi Tahun 2014 terdapat 30 BUMDes atau 11,75%	27,45%	47,06%	70,59%	100%	100%	Program Pengemba-ngan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Urusan Pemberdayaan masyarakat Desa (BPMPD)
Sasaran 6 : PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH								
Strategi: Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata								
Arah kebijakan:								
Pelaksanaan Sepekan Pesta Danau Kelimutu yang menjadi momentum dalam pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, sejarah) dalam konteks destinasi wisata	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya "SEPEKAN PESTA DANAU KELIMUTU"	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Pengembangan Kemitraan	Urusan Budaya (Disbudpar)